

JGOP



JOURNAL OF GOVERNMENT AND POLITICS

VOLUME 4, NOMOR 1 JULI 2022

ISSN 2774-728X (PRINT) ISSN: 2686-3391 (ONLINE)



JGOP.FISIP@UMMAT.AC.ID

In Cooperation With



Daftar Isi (Table of Content)
Journal of Government and Politics
JGOP

Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota
Berkelanjutan

Hairunnisa, Wisda Aprilia Syaka 1-15

Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara
(IKN) Di Kalimantan Timur, Indonesia

Hariati, Annisa Saskia Saputri 16-28

Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam
Perspektif Demokrasi

Heriyanto 29-46

Praktik Citizenship Dalam Melanggengkan Pelayanan
Kesehatan Melalui Posyandu Sebagai Potret Dari New
Public Service Studi Kasus Pada Posyandu Tanjung Kota
Madiun Dan Posyandu Delima Kota Malang

Tia Subekti, Irza Khurunin, Intan Rahmawati 47-63

Implementasi Program Desa Mandiri Di Desa Sebunga,
Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

Debbie Yuari Siallagan, Heri Yanto, M. Awaluddin 64-77

Kualitas Pelayanan Publik dan Kepuasan Pelanggan
Laboratorium Pemeriksa COVID-19: Studi kasus di
Laboratorium Biohazard Badan POM

Muhammad Erdiansyah, Fitra Yovita Delviona, Dilin Rahayu Nataningtyas 78-90

Peran Mediasi Ethical Behavior pada Pengembangan
Organizational Citizenship Behaviors Auditor Publik

Elaine Violche Acanthus, Putri Mega Desiana 91-110

Akselerasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di
Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Dindin Supratma 111-120

Integrasi Manajemen Talenta dengan Pengembangan
Kompetensi ASN

Rahmat Suparman, Sherwin Mikhael Soantahon 121-132



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391
Vol. 4 No. 1 Juli 2022

Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



Implementasi Program Desa Mandiri Di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

Debbie Yuari Siallagan¹, Heriyanto², M. Awaluddin³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Pontianak

InfoArtikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 17-05-2022

Disetujui: 11-07-2022

Dipublikasikan :

29-07-2022

Kata Kunci :

healt services;

citizenship; New Public

Service, Public Interest

Kemandirian desa merupakan kunci sukses untuk membangun ekonomi desa dalam mewujudkan program desa mandiri dan sejahtera dan mengimplementasikan UU desa secara konsisten. Strategi yang diperlukan untuk mewujudkan Desa Mandiri Sejahtera antara lain: Keterlibatan aktif kaum muda di setiap proses pembangunan desa, dukungan dan pengelolaan dana desa yang benar-benar transparan dan optimal, desa harus memiliki program jangka panjang desa sejahtera dan mandiri, desa harus memiliki peluang dan potensi usaha, kepala desa harus memiliki figur yang mumpuni dan bertalenta, desa didukung infrastruktur penunjang yang memadai, pengelolaan bumdesa yang optimal dan bermanfaat bagi warga desa. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui implementasi program Desa Mandiri di Desa Sebunga Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya manusia di Desa sebunga sangat kurang dikarenakan tidak memiliki dokter dan perawat, dimana tenaga kesehatan disuatu desa sangatlah penting untuk dimiliki dikarenakan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat di suatu desa. Karakteristik agen pelaksana dalam kebijakan ini baik, agen pelaksanaanya ialah kepala desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sikap/kecenderungan agen pelaksana kurang baik masih banyak orang-orang yang terlibat belum memahami tugas dan fungsinya sehingga kurang patuh terhadap kebijakan. komunikasi pemerintah desa juga secara rutin mengadakan musyawarah dengan RT/RW maupun masyarakat dalam hal pembangunan desa, seperti membuat jadwal rutin keamanan siskamling dan secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Nilai IKS dan IKE masih belum sempurna yaitu menunjukkan belum berhasilnya program desa mandiri di desa sebunga dikarenakan masih banyak indikator-indikator penilaian yang belum terpenuhi, pemerintah desa, masyarakat desa dan bantuan pemerintah daerah harus secara bergotong royong membangun desa dan melengkapi semua sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan program desa mandiri yang sesungguhnya.

**The Implementation Of The Independent Village Program In Sebunga Village,
Sambas Regency, West Kalimantan**

Abstract

Village independence is the key to success in developing the village economy, especially in developing the Independent and Prosperous Village Program, as well as in implementing village laws consistently. The strategies needed to realize an Independent and Prosperous Village include: (1) Active involvement of young people in every village development process; (2) Completely transparent and optimal support and management of village funds; (3) Long-term program for Independent and Prosperous Villages; (4) the business opportunities and potentials owned by the village; (5) The Village Head must have a capable and talented figure; (6) The village has adequate supporting infrastructure; and (7) Management of Village-Owned Enterprises that are optimal and beneficial for all villagers. The purpose of this study was to determine the implementation of the Mandiri Village program in Sebunga Village, Sambas Regency. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation studies. The results of the study indicate that there is still a lack of human resources in Sebunga Village because they do not have doctors and nurses, even though health workers in a village are very important to have because they affect the quality of public health in a village. The characteristics of implementing agents in this policy are good, in which the implementing agents are the Village Head and Village-Owned Enterprises. The attitude or tendency of implementing agents is not good because there are still many people involved who do not understand their duties and functions and do not comply with policies. Communication between members of the Village Government is also seen in the regular meetings with the RT (Neighborhood Unit), RW (Community Unit) and the wider community in terms of village development, such as making routine security schedules and jointly actively participating in business entities. Owned by the Village. On the other hand, the values of the Social Resilience Index and the Economic Resilience Index are considered still not perfect because they indicate that the Independent Village Program in Sebunga Village has not been successful. This is because there are still many assessment indicators that have not been met. Therefore, the Village Government, village communities and local government assistance must work together to build villages and complete all supporting facilities and infrastructure to realize a truly independent village program.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Desa Mandiri merupakan desa yang mendapat pengakuan dari pemerintah karena memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Pengakuan pemerintah tentang desa mandiri tersebut di tetapkan secara tertulis dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi hal yang penting bagi desa. Melalui UU Desa, negara memberikan pengakuan dan kepastian hukum bagi keberadaan desa.

Kemandirian desa merupakan kunci sukses untuk membangun ekonomi desa dalam mewujudkan program desa mandiri dan sejahtera dan mengimplementasikan UU desa secara konsisten. Sebagai aturan hukum UU Desa harus menjadi panduan dan pedoman bagi implementor dalam melaksanakan pembangunan suatu daerah. Didalam UU Desa, kekuatan untuk membangun desa bersumber dari kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat desa itu sendiri yaitu perangkat desa bersama warga desa harus memahami dan mampu memberdayakan kekuatan potensi desanya. Agar terwujudnya pelaksanaan Desa Mandiri Sejahtera terlaksana dengan baik dibutuhkan partisipasi semua warga desa. Semua warga desa dapat menikmati hasil pembangunan, hasil pengelolaan potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat (Prayogo, 2019)

Seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Hal tersebut merupakan syarat partisipasi masyarakat perdesaan dalam pembangunan sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri Partisipasi masyarakat harus dipahami bahwa setiap pelaku ekonomi harus ikut serta dalam setiap tahap pembangunan desa sesuai dengan latar belakang, kemampuan, atau produktivitasnya dan keahlian masing-masing dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan tenggang rasa untuk kepentingan bersama. Pembangunan yang berorientasi pada unsur manusianya berarti pula mempersiapkan manusia untuk ikut aktif dalam proses pembangunan yang berkesinambungan.

Strategi yang diperlukan untuk mewujudkan Desa Mandiri Sejahtera antara lain: pertama, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Kedua, memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Ketiga, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Keempat, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif (Kurniawan, Borni, 2015).

Desa sebunga merupakan desa yang ada dikecamatan sajingan besar kabupaten sambas Indeks Desa Membangun (IDM) terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi (IKL). Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah). Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana)(Limbangan, 2022)

. Berikut adalah status indeks desa membangun kecamatan sajingan tahun 2019-2021

Tabel 1.

No	Nama Desa	Status IDM 2019	Status IDM 2020	Status IDM 2021
1	Desa Kaliau	Mandiri	Mandiri	Mandiri
2	Desa Sebunga	Mandiri	Mandiri	Mandiri
3	Desa Santaban	Maju	Maju	Maju
4	Desa Sanatab	Maju	Mandiri	Mandiri
5	Desa Sungai Bening	Berkembang	Maju	Maju

Sumber: kantor camat sajingan 2021, diolah peneliti

Status Indeks Desa Membangun (IDM) didesa sebunga dari tahun 2019-2021 merupakan desa mandiri dimana komponen penilaian desa mandiri terpenuhi dari beberapa indikator yang diberikan oleh IDM. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program desa mandiri di desa sebunga kecamatan sajingan kabupaten sambas terlaksana dengan baik. Dari semua komponen yaitu IKS, IKL dan IKE merupakan komponen yang sudah terpenuhi secara syarat dalam menentukan status desa mandiri pada desa sebunga.

Keberhasilan implementasi dari suatu program yang ditetapkan oleh pemerintah tergantung pada tingkat kinerja implementor kebijakan yang mana dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah daerah kabupaten sambas. Apabila program kebijakan pemerintah yang telah disusun tidak di implementasikan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut tidak akan sampai dengan tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Proses implementasi program bukan hanya dilaksanakan oleh satu lembaga pemerintah saja melainkan antar lembaga. Lembaga-lembaga tersebut mengupayakan dan menata sumber

daya manusia dan unit-unit yang mengarah pada upaya menjadi hasil sesuai dengan tujuan dari program desa mandiri sejahtera.

Kebijakan yang dibuat untuk menanggulangi kemiskinan belum dirasakan berhasil hal ini biasanya disebabkan kurangnya koordinasi dari instansi dengan instansi lainnya. Selain itu wilayah negara Indonesia yang cukup luas ini menjadi factor program tersebut memakan waktu yang cukup lama dalam proses penanggulangan kemiskinan. Alasan lainnya, bahwa menyerahkan sepenuhnya penyusunan dan pelaksanaan program tersebut secara desentralisasi kepada daerah masih dikhawatirkan atau diragukan efisiensinya (Tiza, Agustinus Longa, 2014)

Menurut Fredrich dalam Agustino kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2008). Sementara itu, Anderson dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan (Agustino, 2017)

Implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Sehingga Implementasi kebijakan selalu menarik dibicarakan dan untuk dikaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan maupun pihak-pihak yang berada diluar lingkungan kebijakan. Dalam (Winarno, 2014) mengatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar maupun dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. (Yudistira, 2010) juga menjelaskan bahwa Implementasi megacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Kemudian menurut Widodo (Sutojo, 2015) mengatakan bahwa, “implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan”. Menurut Riant Nugroho (2011) (Nugroho, Riant, 2011) implementasi

kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Ada 6 variabel menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008). Menurut Meter dan Horn, ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran menjadi kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.

b. Sumberdaya.

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif (Zulfian, 2014).

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi-organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Karakteristik agen pelaksana/implementator dalam pelaksanaan kebijakan menangani Implementasi Kebijakan adalah bagian yang sangat dasar dari implementasi kebijakan. Karena kinerja implementasi akan sangat dipengaruhi oleh implementatornya itu sendiri, serta dalam pelaksanaan kebijakan menangani Implementasi Program dibutuhkan agen kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan kebijakan tersebut, agen pelaksana ini harus diisi oleh orang-orang yang terampil dalam bidangnya masing-masing supaya kebijakan dalam menangani Implementasi Program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Rusmini, 2020)

d. Sikap / kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana.

Perlu diketahui jika salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementatornya. Jika para pelaksana kebijakan setuju dengan

bagian-bagian isi dari kebijakan maka implementator akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika ada beda pandangan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Van meter dan van horn menyatakan bahwa disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksana kebijakan, dalam hal ini disposisi dipahami sebagai kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan(Fauziyah, 2021).

e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktifitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat didalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan , begitu pula sebaliknya

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Jalinan hubungan kerja sama sinergis diperlukan agar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagai realitas dari program kebijakan maka diperlukan adanya hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi(Ani, 2017).

METODE PENELITIAN

Dalam usaha mendeskripsikan Implementasi program desa mandiri di desa sebunga kabupaten sambas Kalimantan barat maka penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif. Usaha pendeskripsian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai kondisi situasi dan berbagai fenomena realitas sosial. (Sugiyono, 2016) mengemukakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang memperkuat hasil penelitiannya melalui eksplorasi dan uraian informasi yang menjelaskan mengenai penelitian dan biasanya penelitian deskriptif lebih pada nuansa kualitatif. Oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif. (Mukhtar, 2013) juga menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses implementasi program desa mandiri di desa sebunga kabupaten sambas Kalimantan Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Desa Mandiri Di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Ukuran dan Tujuan kebijakan merupakan faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan, dan indikator kinerja merupakan hal yang penting dalam kebijakan publik, indikator kinerja menilai apakah ukuran/ standar dan sasaran/tujuan telah direalisasikan. Implementasi kebijakan bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari perlunya standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana, oleh sebab itu pemahaman para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting untuk diketahui.

Implementor program desa mandiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai kepada pemerintah desa seyogyanya memahami peraturan UU desa dan komponen indeks desa membangun/indikator desa mandiri dimana jika implementor tidak memahaminya maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Menurut penelitian (Kehik, Bernardus Seran, 2016) Dalam konteks pelaksanaan desa mandiri ini masyarakat kurang memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan. Karena kurang memahami maka masyarakat kurang menerima kebijakan tersebut dan pada akhirnya tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Adapun sasaran dan tujuan desa Mandiri adalah membaiknya kinerja pembangunan di pedesaan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga melalui pengembangan usaha produktif di pedesaan, meningkatnya pengelolaan pembangunan desa secara terpadu berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tujuan program desa mandiri ini cukup dipahami oleh aparat desa maupun masyarakat desa sebunga, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya pemerintah desa dan masyarakat desa sebunga bergotong royong dalam membangun fasilitas-fasilitas desa yaitu seperti terdapat beberapa tempat pembuangan sampah, adanya lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi/BUMDES dan secara bersama-sama mengaktifkan posyandu.

B. Sumberdaya.

Ketersediaan sumber daya dalam suatu organisasi juga merupakan suatu hal yang harus dimiliki dan berpengaruh besar terhadap pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber kebijakan mempunyai makna yang cukup luas, sumber-sumber yang tersedia atau terlibat dalam implementasi kebijakan selain dukungan pendanaan implementasi kebijakan juga mencakup orang-orang yang mempunyai kompetensi yang memadai dari segi jumlah dan kemampuan, sarana dan prasarana termasuk akses terhadap informasi yang jelas dan cepat.

Sumberdaya manusia merupakan kunci utama keberhasilan program desa mandiri, sumberdaya yang baik dan berkualitas tentunya akan mempengaruhi suatu desa layak dikatakan mandiri. Begitu pula sebaliknya apabila disuatu desa tersebut tidak memiliki sumberdaya yang baik dan tidak berkualitas tentunya akan menjadi penghambat dalam mengimplementasikan semua program pemerintah. Desa sebunga hanya terdapat satu tenaga kesehatan yaitu bidan desa. Desa sebunga tidak memiliki dokter dan perawat, dimana tenaga kesehatan disuatu desa sangatlah penting untuk dimiliki dikarenakan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat di suatu desa. Hal demikian sangat tidak layak bagi desa sebunga mengingat sangat luas wilayah desa sebunga yaitu 352,26 km². suatu wilayah yang sangat luas dengan hanya satu tenaga kesehatan seharusnya belum layak mendapatkan predikat desa mandiri.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti program jaminan kesehatan masih rendah. Banyaknya masyarakat desa yang belum mendaftarkan BPJS kesehatan. Hal tersebut seharusnya sudah menjadi perhatian pemerintah desa untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa pentingnya terjaminnya kesehatan melalui BPJS kesehatan mengingat sangat minimnya tenaga kesehatan di desa sebunga.

Fasilitas merupakan sarana penunjang bagi suatu desa, tanpa adanya fasilitas yang memadai maka suatu desa akan sulit untuk berkembang, beberapa indikator penilaian desa mandiri yaitu adanya ruang terbuka publik dan akses internet di suatu desa, berdasarkan pengamatan peneliti bahwa di desa sebunga belum ada ruang terbuka publik dan tidak adanya akses internet di desa sebunga bahkan di lingkungan kantor desa sebunga tidak terdapat akses internet. Hal ini menunjukkan bahwa desa sebunga belum cukup dikatakan sebagai desa mandiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat dan arah perkembangan desa adalah faktor lokasi, atau letak desa terhadap pusat-pusat fasilitas dan jalan perhubungan (Asbeni, 2020)

C. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik badan administrasi akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan dalam pencapaian tujuan, dimana karakteristik tersebut tidak terlepas dari struktur birokrasi. Melalui struktur birokrasi akan dapat menggambarkan tentang karakteristik dari lembaga pelaksana kebijakan, karena struktur birokrasi dapat diartikan sebagai karakteristik, norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam institusi pemerintahan yang mempunyai potensi apa yang mereka miliki untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

Agen pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan program desa mandiri dalam hal ini yang menjadi agen pelaksananya ialah kepala desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan

modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat. Dalam menjalankan operasionalnya BUMDes dipimpin oleh direktur yang diangkat oleh kepala desa melalui musyawarah desa.

D. Sikap / kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana.

Sikap/Kecenderungan para pelaksana kebijakan memiliki pengaruh penting dalam implementasi kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementor yang memiliki sikap yang baik, patuh terhadap suatu kebijakan akan mempermudah dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Jika sikap implementor tidak patuh maka akan mempengaruhi proses kebijakan untuk mencapai tujuan.

Kecenderungan para pelaksana dalam program desa mandiri di desa sebunga kecamatan sajingan besar kabupaten sambas kalimantan barat yaitu kepala desa sebagai penanggung jawab program desa mandiri terhadap pembangunan fasilitas desa dibidang sosial, ekonomi maupun lingkungan. Meskipun masih banyak fasilitas di desa sebunga yang belum memadai namun sudah ada beberapa fasilitas yang sudah terealisasi dibangun yaitu adanya perpustakaan desa, tersedianya sarana pos kamling dan infrastruktur jalan di desa sebunga sudah baik. Kemudian sekretaris desa memiliki tugas yaitu menjadi penanggung jawab setiap kegiatan di desa sebunga yang sudah disusun setiap tahunnya oleh pemerintah desa. bendahara desa bertanggung jawab untuk membantu kepala desa dalam urusan administrasi keuangan desa. selain agen pelaksana tersebut keterlibatan RT, RW maupun masyarakat berperan aktif dalam membangun desa sebunga.

E. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktifitas Pelaksana.

Komunikasi antara organisasi yang terkait sebagai pelaksana kebijakan sangat penting untuk menunjang efektivitas implementasi. Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif jika para pelaksana yang terlibat dalam implementasi mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan. Hal ini mengandung makna bahwa mereka yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan publik harus melakukan komunikasi dengan baik karena dengan berkomunikasi secara baik mereka akan mengetahui dan memahami apa yang harus dilaksanakan serta bagaimana cara melaksanakannya.

Implementasi program desa mandiri di desa sebunga melibatkan beberapa organisasi pelaksana yaitu kantor desa sebunga dan kecamatan sajingan. Organisasi pelaksana harus memahami tugas dan fungsi organisasi dalam mensukseskan program desa mandiri di desa sebunga. Pemerintah desa sebunga secara rutin melakukan koordinasi dengan mengadakan rapat bersama pihak kecamatan sajingan hal yang menjadi setiap agenda adalah pembangunan fasilitas desa, infrastruktur dan kondisi sosial masyarakat desa sebunga. Selain ini pemerintah

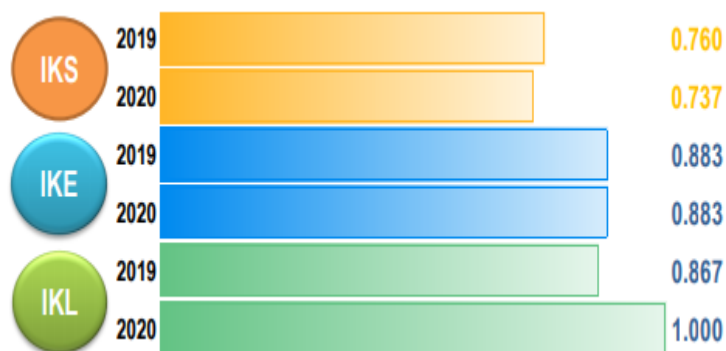
desa juga secara rutin mengadakan musyawarah dengan RT/RW maupun masyarakat dalam hal pembangunan desa, seperti membuat jadwal rutin keamanan siskamling dan secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini menunjukkan bahwa organisasi pelaksana memahami tugas dan fungsinya sebagai implementor program desa mandiri.

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Kondisi ekonomi sosial dan politik yang ada pada lingkungan implementasi kebijakan dapat memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Beberapa kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kebijakan diantaranya sumber-sumber ekonomi yang dapat mendukung implementasi kebijakan, kondisi ekonomi sosial masyarakat, sifat pendapat umum tentang pentingnya isu kebijakan, dukungan elit, dan dukungan kelompok kepentingan lainnya. Untuk menilai kinerja implementasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah sejauhmana lingkungan eksternal tersebut turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Kondisi sosial dan ekonomi di desa sebunga masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan dari tahun 2019 sampai kepada tahun 2020. Berikut data nilai Indeks Desa Membangun Desa Sebunga tahun 2020.

Gambar 1.1. Nilai IDM Desa Sebunga tahun 2019-2020



Sumber: Kecamatan sajingan, kabupaten sambas, 2021

Dalam indeks ketahanan sosial desa sebunga yaitu mencakup beberapa indikator kesehatan, pendidikan, modal sosial dan permukiman menunjukkan dari beberapa indikator diatas bahwa nilai IKS desa sebunga masih belum sempurna dikarenakan masih banyak kekurangan yang terjadi yaitu kualitas kesehatan masyarakat desa sebunga masih rendah dikarna masih sedikit masyarakat yang terlibat kepesertaan jaminan kesehatan, kemudian kualitas pendidikan masyarakat desa sebunga juga masih rendah dan berdasarkan data bahwa sekolah tingkat menengah atas, pendidikan non formal seperti paket A-B-C dan kegiatan kursus

belum terlaksana di desa sebunga.

Solidaritas sosial merupakan perasaan saling percaya antara para anggota masyarakat di suatu desa. pentingnya solidaritas sosial yang dimiliki membuat kondisi sosial di desa tersebut menjadi baik dan setiap masyarakat akan memiliki rasa aman. Namun berdasarkan wawancara bahwa di desa sebunga belum adanya terdapat kelompok olahraga dan masih ada beberapa warga yang tidak terlibat gotong royong, selain itu tingkat perkelahian massal di desa sebunga masih sering terjadi oleh sebab itu hal ini menunjukkan rasa aman yang dimiliki masyarakat desa masih sangat rendah.

Berdasarkan gambar diatas juga dapat dilihat bahwa nilai IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi) di Desa sebunga juga masih belum sempurna. IKE mencakup beberapa indikator yaitu keragaman produksi, perdagangan, akses distribusi, akses kredit, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah. Dari lima indikator diatas ada tiga indikator yang masih rendah yaitu perdagangan, akses distribusi dan akses kredit. Berdasarkan hasil wawancara bahwa indikator perdagangan yang berkaitan dengan pasar desa dimana di desa sebunga belum ada pasar desa permanen yang hanya ada yaitu pasar dadakan seperti pasar malam. Kemudian dari indikator akses distribusi yaitu kantor pos dan jasa layanan ekspedisi belum tersedia di desa sebunga. Dan indikator yang terakhir adalah akses kredit yaitu masih kurangnya akses terhadap lembaga keuangan dan perkreditan seperti lembaga perbankan yang belum ada di desa sebunga.

Nilai IKS dan IKE yang masih belum sempurna menunjukkan belum berhasilnya program desa mandiri di desa sebunga dikarenakan masih banyak indikator-indikator penilaian yang belum terpenuhi, pemerintah desa, masyarakat desa dan bantuan pemerintah daerah harus secara bergotong royong membangun desa dan melengkapi semua sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan program desa mandiri yang sesungguhnya.

PENUTUP

Tujuan program desa mandiri ini dipahami oleh aparat desa maupun masyarakat desa sebunga, bahwa setiap tahunnya pemerintah desa dan masyarakat desa sebunga bergotong royong dalam membangun fasilitas-fasilitas desa yaitu seperti terdapat beberapa tempat pembuangan sampah, adanya lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi/BUMDES dan secara bersama-sama mengaktifkan posyandu. Namun, sumberdaya manusia di Desa sebunga sangat kurang dikarenakan tidak memiliki dokter dan perawat, dimana tenaga kesehatan di suatu desa sangatlah penting untuk dimiliki dikarenakan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat di suatu desa. Karakteristik agen pelaksana dalam kebijakan ini baik, agen pelaksananya ialah kepala desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sikap/kecenderungan agen pelaksana

kurang baik masih banyak orang-orang yang terlibat belum memahami tugas dan fungsinya sehingga kurang patuh terhadap kebijakan. komunikasi pemerintah desa juga secara rutin mengadakan musyawarah dengan RT/RW maupun masyarakat dalam hal pembangunan desa, seperti membuat jadwal rutin keamanan siskamling dan secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Nilai IKS dan IKE masih belum sempurna yaitu menunjukkan belum berhasilnya program desa mandiri di desa sebunga dikarenakan masih banyak indikator-indikator penilaian yang belum terpenuhi, pemerintah desa, masyarakat desa dan bantuan pemerintah daerah harus secara bergotong royong membangun desa dan melengkapi semua sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan program desa mandiri yang sesungguhnya.

Adapun rekomendasi yang peneliti berikan yaitu pemerintah harus memenuhi kekurangan sumberdaya manusia di desa sebunga yaitu tenaga kesehatan dan memfasilitasi desa dengan menyediakan ruang terbuka publik dan akses internet di desa sebunga khususnya dilingkungan kantor desa sebunga. Nilai IKS dan IKE yang belum sempurna menunjukkan bahwa pemerintah harus segera meningkatkan kualitas kesehatan, kualitas pendidikan dan kualitas ekonomi di desa sebunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ani, S. (2017). Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, Dan Guideline) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Provinsi Lampung Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 8(1), 101-107.
- Asbeni. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri. *Jurnal PATANI*, 4(2), 39–45.
- Fauziyah. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672–691.
- Kehik, Bernardus Seran. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Program Desa Mandiri Cinta Petani Di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, 75–77.
- Kurniawan, Borni. (2015). *Desa Mandiri Desa Membangun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Limbangan, D. (2022). *IDM (Indeks Desa Membangun) Tahun 2022*. Desa Limbangan , Kec Limbangan Kab Kendal.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. GP Press Group.

- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. PT Elex Media Computindo.
- Prayogo, C. (2019). *Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri*. Warta Ekonomi.
- Rusmini. (2020). Pelaksanaan Program Kebijakan Desa Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal MODERAT*, 6(3), 624–639.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Sutojo. (2015). *Good Corporate Governance*. PT Damar Mulia Pustaka.
- Tiza, Agustinus Longa. (2014). Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara). *Wacana Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17(1), 59.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, Cetakan ke-2*. PT. Buku Seru.
- Yudistira. (2010). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo.
- Zulfian. (2014). Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*. *Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi*, 1(2), 33–43.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)